

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan Lembaga hukum yang memiliki peranan penting dalam mengadili kasus – kasus yang terjadi di Masyarakat. Untuk mengelola keuangannya, Pengadilan Negeri Cibinong membutuhkan sistem yang baik dan akurat. Salah satu metode untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berbasis di Bogor.

Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan di tengah tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai bagian penting dari sistem peradilan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Cibinong membutuhkan sumber daya finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi – fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, pencairan uang persediaan yang efektif dan terstruktur dengan baik memungkinkan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya secara tepat waktu dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku.

Proses pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan dan resiko. Kompleksitas dalam prosedur administrasi, ketidaksesuaian dengan regulasi keuangan, serta potensi penyalahgunaan atau kehilangan dana menjadi beberapa masalah yang dihadapi. Selain itu, aspek kontrol internal pengawasan juga menjadi fokus penting dalam memastikan integritas proses pencairan uang persediaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prosedur pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Oleh karena itu, Tugas Akhir terkait Tinjauan Atas Prosedur Pencairan UP Pada Bagian Keuangan Dan Umum Di Pengadilan Negeri Cibinong menjadi penting dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan keuangan masyarakat dan meningkatkan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

I.2 Tujuan TA

Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap prosedur pencairan uang persediaan pada bagian umum dan keuangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Berikut tujuannya:

1. Untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam proses pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Untuk mengetahui dan memahami dokumen - dokumen serta ketentuan prosedur uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Untuk memahami skema alur dari prosedur pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong.

I.3 Manfaat TA

Berikut adalah manfaat dari penulisan Tugas Akhir:

I.3.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini akan memberikan pemahaman teoritis yang lebih baik tentang konsep pengelolaan keuangan publik dalam konteks pengadilan. Dengan mengacu pada teori-teori terkait tentang administrasi keuangan publik dan praktik terbaik dalam pengelolaan uang persediaan, tugas akhir ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif prosedur saat ini.

I.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan keterampilan penelitian dan penulisan akademik, serta menerapkan teori ke dalam Praktik Kerja Lapangan. Proses ini juga meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan pemecahan masalah yang penting untuk karir profesional.

2. Bagi Universitas

Tugas Akhir ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan akademik mahasiswa dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Tugas Akhir ini juga dapat menjadi sumber informasi penting bagi universitas untuk evaluasi program studi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Bagi Instansi

Tugas Akhir ini memberikan wawasan tentang efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong, mempertimbangkan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Hal ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta membantu menciptakan sistem yang lebih efisien dan andal dalam administrasi keuangan.